



**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2017**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembentukan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara yang terarah terprogram dan sesuai prioritas, maka perlu disusun dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2017;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disepakati oleh badan pembentukan peraturan daerah DPRD kabupaten bolaang mongondow utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 193 Tahun 2014 Tanggal 28 Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masa Jabatan 2014-2019;
17. Keputusan Gubernur Nomor 240, Tanggal 6 Oktober 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masa Jabatan 2014-2019.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2017;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 02/Kep/DPRD/BOLMUT/XII/2014 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014-2019.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tanggal 20 Februari 2017;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Tanggal 20 Februari Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara Tahun 2017. 'Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini'.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 20 Februari 2017

**PIMPINAN DPRD  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA  
KETUA,**



**KAREL BANGKO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



**ABDUL HARIS BANGKO, SH MM  
NIP. 19810701 200604 1 011**

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017.

**DAFTAR RANPERDA  
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Tentang</b>
1.	Rancangan Peraturan Daerah	Ketertiban Umum
2.	Rancangan Peraturan Daerah	Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa
3.	Rancangan Peraturan Daerah	Retribusi Izin Lingkungan
4.	Rancanagn Peraturan Daerah	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Ibu Kota
5.	Rancangan Peraturan Daerah	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Bolangitang Barat
6.	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016
7.	Rancangan Peraturan Daerah	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum
8.	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2017
9.	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
10.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengangkatan dan Pemberhentian BPD
11.	Rancangan Peraturan Daerah	Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa
12.	Rancangan Peraturan Daerah	Bantuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin
13.	Rancangan Peraturan Daerah	Penertiban Hewan Lepas

14.	Rancangan Peraturan Daerah	Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
15.	Rancangan Peraturan Daerah	Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sangadi
16.	Rancangan Peraturan Daerah	Izin Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 20 Februari 2017

  
**PIMPINAN DPRD**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**KETUA,**  
  
**KAREL BANGKO**